

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam bab III pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, adapun bentuk dan susunan APBD yang di dasarkan pada permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (1) di kelompokkan atas pendapatan Asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar pendapatan dan belanja daerah yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor-sektor unggul, infrastruktur, dan pembinaan wirausaha mandiri di masyarakat maka dapat melaksanakan setiap program pembangunan daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Wilayah kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kabupaten Belu terletak strategis karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste maka diperlukan pembangunan infrastuktur, pendidikan, dan

peningkatan sektor unggulan daerah agar dapat menunjang pembangunan dan perekonomian daerah kabupaten Belu. Dengan demikian perlu melihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu tahun 2010-2015. Besaran pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Belu Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)
2010	411.427.124.782,44	240.283.809.000,00
2011	449.689.847.387,21	260.613.905.000,00
2012	494.209.142.278,54	273.663.089.000,00
2013	548.028.517.872,67	285.912.169.000,00
2014	609.517.317.577,99	300.329.504.841,00
2015	675.040.429.217,62	316.698.140.000,00

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa setiap tahun PAD dan DAU meningkat setiap tahunnya dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dimana PAD pada tahun 2010 sebesar 411.427.124.782,44 dan pada tahun 2015 nilainya sebesar 675.040.429.217,62 terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 38.262.722.604,77 lebih besar dari tahun sebelumnya, peningkatan pendapatan daerah ini umumnya dikarenakan kontribusi pajak dari masyarakat meningkat, Sedangkan DAU untuk kabupaten Belu dari tahun 2010–2015 mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2013, yakni pada tahun 2010 DAU sebesar 240.283.809.000,00 hingga tahun 2015 DAU kabupaten Belu nilainya sebesar 316.698.140,00 terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 239.922.110.860.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang“ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Periode Tahun 2003 - 2016** ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu.
2. Mengetahui besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi untuk Pemerintah dalam hal ini Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Belu (BPPKAD) dalam mengambil kebijakan.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya peminat ekonomi pembangunan.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.